ANALISIS KEBIJAKAN: MENGUKUR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)

PERTANYAAN UTAMA/PENTING

1) MENGAPA KUALITAS KEBIJAKAN PENTING?

2) BAGAIMANA PENERAPAN IKK DIKAITKAN DENGAN EBP?

Mengapa Kebijakan yang Baik Penting?



Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB, 25 November 2019



Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan

kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya".

Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis."

Tantangan Indonesia dlm Indeks Global



Global Competitiveness
Index - Special Edition 2020

Indikator 'Public Institutions'

Rank 18 (Skor 58,8)

dari 37 Negara

Area Perbaikan:

- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan dan regulasi bervisi jangka panjang;
- Inisiasi framework untuk transformasi digital.



Global Talent Competitiveness Index 2020

> Rank 65 (Skor 41,8) dari 132 Negara

Area Perbaikan:

- Keterampilan dan pengetahuan global (global knowledge);
- Keterampilan profesional (professional skill);
- · Kualitas riset dan inovasi.



Government
Effectiveness Index
2019

Rank 73 (Skor 60,1) dari 193 Negara

Area Perbaikan:

- Kualitas SDM sektor publik;
- Kualitas pelayanan dan perumusan kebijakan publik:
- Kredibilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan publik.

Beragam Masalah dalam Kebijakan

Konflik

Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya

Inkonsisten

Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya

Multitafsir

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas.

Tidak operasional Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. YANG
BERBASIS
BUKTI
(masih kurang)

Sumber: Bappenas (2015)

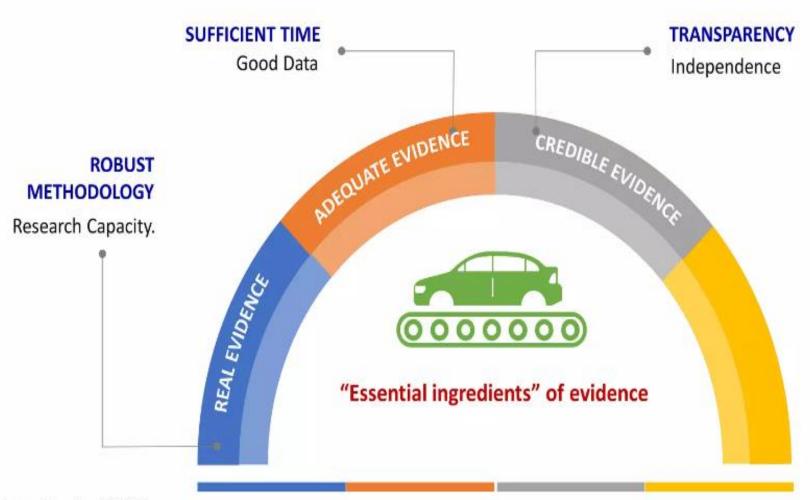
PENERAPAN *Evidence-based Policy Making* & Kaitannya dengan indeks kualitas kebijakan

Prolog: Sejarah EBP



- Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan.
- Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan.

Karakteristik Evidence yang Baik



Court et.al. (2006: 33)

- Availability,
- Accuracy,
- Objectivity,
- Credibility,
- Generalizability,
- Relevance.

Sumber: Banks, 2009

Urgensi Kebijakan Berbasis Bukti



Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah kegagalan kebijakan (policy failures) dan munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan, yang biasanya terjadi karena 2 hal:







Unintended Consequences of Policy

Kajian kebijakan diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir "dampak tak termaksud" atau konsekuensi yang tidak direncanakan (konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Robet K.

Morten dalam tulisannya berjudul The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action).

Eastern Economic Journal (2021) 47:206-226 https://doi.org/10.1057/s41302-021-00187-7

ORIGINAL ARTICLE



Unintended Consequences: Ambiguity Neglect and Policy Ineffectiveness

Lorán Chollete¹ · Sharon G. Harrison²

Published online: 1 February 2021 © EEA 2021 Pada tahun 1989, Pemda Mexico City menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara dengan melarang para pengemudi mengendarai **satu hari kerja/minggu**. Pelanggarnya dikenakan denda besar.

Ternyata, banyak orang membeli mobil yang lain — pada umumnya mobil bekas dengan emisi tinggi — hanya untuk menghindari dari pelanggaran terhadap kebijakan tsb.

Dalam hal ini, keputusan pengemudi untuk menambah mobil justru **menimbulkan eksternalitas negatif** berupa polusi udara yang semakin parah.

Idealita vs Realita Penyusunan Kebijakan



Policy making is based on EVIDENCE



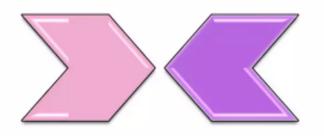


Policy making is based on:

- Intuition
- Common sense
- Experience
- Ideology
- Public opinion
- Political interests that can swing from one end of the spectrum to the other for the sake of rent seeking.

Relasi Policy Analyst - Policy Maker

Policy Analysts



Policy Makers

- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
- Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;
 - Kedekatan dengan birokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang darl kerja akademis.



- Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.

Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES

The policy process in context

- What evidence is needed and / or available to test the "real world" problem?
- · How can evidence best be presented?

POLITICAL WIDER PUBLIC CONTEXT CONTEXT

How does the problem / policy fit with government manifesto / priorities?

- · What policy conflict / priorities need to be resolved?
- Is a cross-outling approach needed?
 - Who else within government needs to be involved and how?
 - What is the impact of devolution?
 - What is the role of the EU?
 - How should work be organised?
- How should front-line staff be involved?
 - Understanding the problem
- POLICY Testing success and making it
 - **PROCESS**
 - **Putting solutions** into effect
- ensure policy becomes self What training and sustaining? support for front-line staff is needed?
 - · What IS changes are

- required (if any)? What is the impact on
 - other existing and developing policies? What are the costs / benefits of different options?

· What sort of cross-

cutting intervention is

- What evaluation systems and performance targets are needed?
- What are the alternatives to legislation &

- · What are the desired policy outcomes?
- . Which re the most effective outputs for achieving these outcomes?
- Who are the key stakeholders and how should they be involved?
 - What are the needs & views of those the policy seeks to influence / affect?
- . How and when should key political representatives be involved?

Are Ministers

signed up?

What is the

strategy for

presenting

policy?

 What have the experiences of other countries been?

· What evidence is,

and useful?

available, relevant

- What are the risks to the policy and how can they be managed?
- · What is the impact of possible solutions on equal opportunities. business, women, environment etc.



Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi.

Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya **haruslah** yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset.

Saya meyakini, **kebijakan** publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi.

Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 - 27 Juni 2007)

Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional policy making for the twenty first century. London.

ORGANIS-ATIONAL CONTEXT

What needs

to happen to

How / when

should policy

effectiveness &

contribution to

objectives be

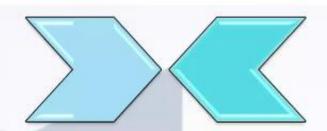
corporate

reviewed?

- Who needs to be told what, when and how?
- · How can stakeholders be kept committed and involved?
- What are the quick wins?

Gap Between Knowledge & Policy, dan Urgensi EBP

Knowledge (Research)



Policy



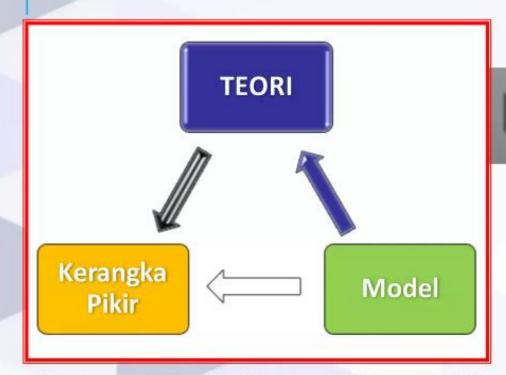
- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
 - Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;

EBP

- Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.

EBP sebagai Esensi Policy Analysis





Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam analisis kebijakan publik

Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019)

Kebijakan publik yang berkualitas

- Kejelasan teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir, untuk memberi arah dan orientasi terhadap analisis dan pertanyaan penelitian.
- Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir).
- Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat. Namun, teori saja sangat tidak cukup. Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar dapat bekerja (workability).

EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan 🗔



"You are completely free to carry out whatever research you want, so long as you come to these conclusions."

Power speaks to truth

(Alison Shaw, 2005)



Truth speaks to power

(Price, 1965)

EBP KETERKAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)

1. MEMBANGUN KUALITAS KEBIJAKAN

Hasil kajian LAN menjadi diskusi di berbagai media dan ruang-ruang publik

Khazanah Pengetahuan Hasil kajian LAN menjadi bahan referensi dalam pembuatan bahan ajar di berbagai lembaga diklat atau di perguruan tinggi, serta menjadi bacaan bagi birokrat, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Hasil kajian LAN menjadi menjadi salah satu telaahan akademis untuk issu-issu kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah, dalam bentuk policy paper & policy brief.

Bahan Formulasi Kebijakan

Diskursus

Publik

SDM Analis Kebijakan Keberadaan Analis Kebijakan terus diperkuat baik secara kualitas maupun kecukupan formasinya.

Epilog

- IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola atau business proses pembuatan kebijakan. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas kebijakan adalah integritas dan komitmen pembuat kebijakan dalam mendedikasikan kebijakan bagi kemajuan institusi dan negerinya.
- IKK bertujuan membiasakan (habituasi) praktik baik dalam perumusan kebijakan publik.
- Skor IKK yang rendah pada tahun tertentu, bukan cerita akhir tentang sebuah instansi/daerah. Pengalaman 2021 harus menjadi lesson learned untuk membuktikan kualitas kebijakan yang jauh lebih baik pada 2023.
- Kualitas kebijakan bukanlah tujuan akhir dari pengukuran IKK. Tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa terhadap bangsa lain, sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam UUD 1945.
- Keberadaan JF Analis Kebijakan perlu didayagunakan untuk mengawal pelaksanaan IKK di tingkat instansi, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan secara progresif.

IKK dan Indeks RB

C

IKK sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional pada tataran meso pada sasaran Birokrasi yang Kapabel, sesuai PermenPAN 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan target Persentase kementerian/lembaga/pemda dengan IKK baik sebesar 100% pada tahun 2024

Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Program/Area Perubahan:

Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Indeks Reformasi Hukum

- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);
- Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- Penguatan sistem regulasi nasional lingkup instansi pemerintah;

Indeks Kualitas Kebijakan

- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
- Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Latar Belakang IKK

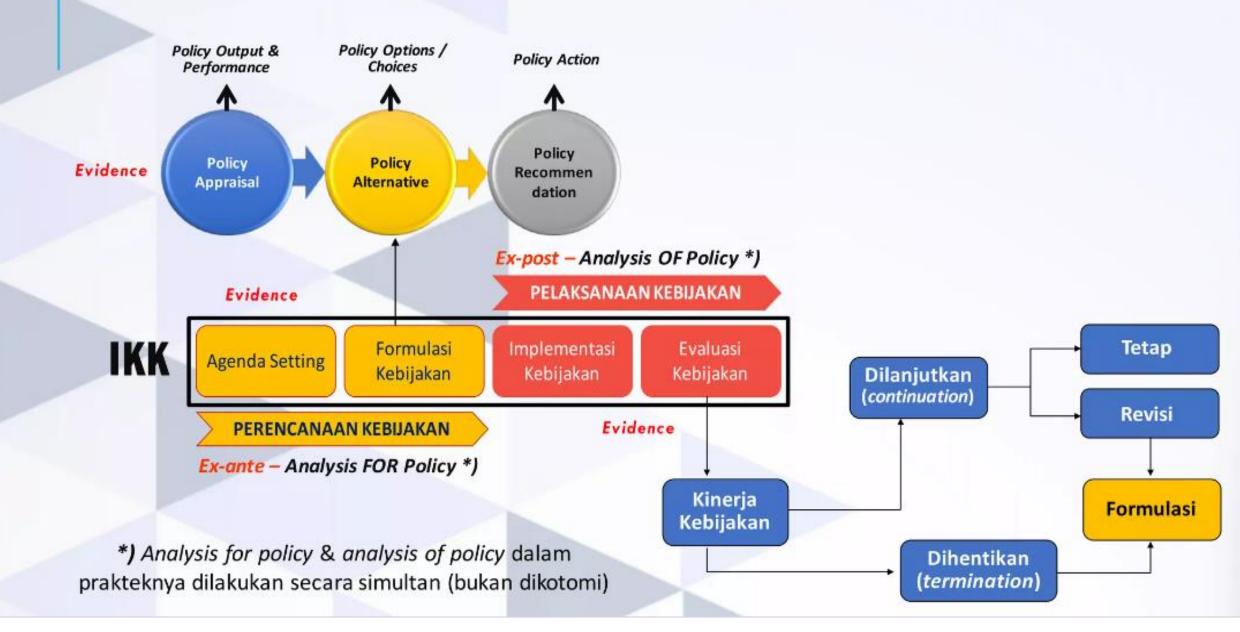
Kualitas kebijakan masih kurang baik, tumpang-tindih, tidak berpihak pada publik, minim bukti (tidak evidencebased). 2005-2015 terdapat 41.223 regulasi
di pusat & daerah berpotensi
tumpang tindih (Bappenas, 2015).
Pembatalan menyelesaikan
masalah?
Perlu perbaikan dari hulu s.d hilir
kebijakan!

IKK

IKK telah diadopsi sebagai salah satu indeks pengukuran capaian RB 2020-2024 oleh Kementerian PAN-RB sesuai PermenPAN-RB No. 25/2020 Kegiatan Level Mikro RB 2020-2024 dengan kegiatan: (a) perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting & formulasi kebijakan; (b) evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

EBP & Keterkaitannya dengan IKK





Framework IKK

IKK

PERENCANAAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Instrumen IKK terdiri dari:

2 Dimensi

4 Sub Dimensi

13 Indikator

39 Pertanyaan

Agenda Setting Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan

Pengukuran agenda setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.

Pengukuran
implementasi
kebijakan dengan
berfokus pada
dimensi
pengorganisasian,
komunikasi
kebijakan dan
monitoring
kebijakan.

Pengukuran
evaluasi kebijakan
dengan melihat
pada efektivitas,
efisiensi, dampak
dan kemanfaatan,
penerimaan dan
responsivitas
kebijakan.

